

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia didukung dengan letak geografis yang sangat strategis, banyak potensi-potensi yang tersebar di seluruh kawasan, baik potensi alam maupun potensi budaya. Potensi alam serta budaya yang dimiliki masing-masing kawasan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata secara utuh. Potensi-potensi ini apabila dikembangkan diharapkan akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat khususnya di daerah tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi adanya desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu Negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

Dengan adanya desentralisasi maka muncullah kebijakan otonomi dalam suatu daerah yang telah digulirkan pemerintah pusat, yang bermaksud untuk mengoptimalkan akselerasi pembangunan di daerah dan terealisasinya peningkatan

kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah, sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah dan keadilan, demokratisasi, penghormatan terhadap budaya lokal, serta perhatian terhadap keanekaragaman potensi daerah kian meningkat.

Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, merupakan pondasi dari pertumbuhan perekonomian nasional yang diarahkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan jalan salah satunya yakni mengutamakan sektor pariwisata untuk meningkatkan penerimaan Negara (devisa), memperluas peluang kerja dan usaha akan mendorong pembangunan daerah secara mandiri tanpa harus merusak budaya lokal dan lingkungan.

Sektor pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi memiliki mata rantai yang sangat panjang, banyak menampung kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dari hasil penjualan barang maupun jasa. Pariwisata memberi dampak sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (Tadaro dkk, 2006:151). Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multi dimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pariwisata bagaimanapun juga memiliki andil dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di pedesaan dimana proyek pariwisata dikembangkan, (Yoeti, 2008:18). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun

2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dalam kegiatannya, sektor pariwisata melibatkan beberapa sektor, seperti : sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan yang secara bersama-sama menghasilkan produk pelayanan jasa kepariwisataan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Demikian juga pengembangan seni kerajinan dan angkutan darat merupakan dukungan yang tidak kalah penting untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata. Artinya keberhasilan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan hanya dengan berfokus pada sektor pariwisata semata, tetapi harus mengembangkan juga sektor-sektor pembangunan sebagai sarana dukungan pada keberhasilan sektor.

Pembangunan Kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai peraturan pelaksanaanya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan turunan lainnya, melalui diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan semakin lengkap.

Desa wisata memiliki ketentuan untuk pengembangan desa wisata itu sendiri maupun untuk percontohan desa lainnya. Disusunlah ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa wisata agar berkelanjutan, yaitu (Priasukmana & Mulyadin 2001) (1) aksesibilitas baik, (2) obyek-obyek menarik untuk dikembangkan sebagai obyek wisata, (3) Keterlibatan masyarakat (4) partisipasi masyarakat (5) keamanan di desa terjamin (6) tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai dan (7) beriklim sejuk atau dingin dan (8) berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Mengacu pada UU RI No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan memaparkan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah (pasal 1 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata). Di dalamnya mengandung tiga unsur, yaitu manusia sebagai unsur pelaku kegiatan pariwisata, tempat sebagai unsur fisik yang mencakup kegiatannya, dan waktu sebagai unsur yang dihabiskan dalam perjalanan (Wahab,1992:12). Dengan demikian,

pariwisata merupakan serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga ataupun kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan.

Dimana dalam pengembangan wisata ini lebih fokus dalam menekankan pada adanya perbaikan pembangunan wilayah secara bertahap dari suatu kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Hal ini merupakan bahwa pengembangan potensi sumber daya alam dalam pembangunan wilayah lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada daerah (Friedmann & Allonso, 2008). Terciptanya pariwisata di Kabupaten Sampang semakin menarik wisatawan untuk berkunjung, hal ini merupakan suatu pembangunan wilayah semakin berkembang dengan potensi sumber daya alam yang dikembangkan dan sangat menarik masyarakat dari daerah mana saja. Dari tahun ke tahun objek wisata di sampang semakin mengalami peningkatan, hal ini tentunya meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, dimana Kabupaten Sampang berada di tengah-tengah jalur transportasi antara Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Secara topografi, Kabupaten Sampang terdiri dari 4 kategori daerah yaitu daerah pantai, daerah kepulauan, daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Selain itu, Kabupaten Sampang juga memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup dan

pertumbuhan kepariwisataan, salah satunya obyek wisata Pantai Lon Malang yang berada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dimana wisata Pantai Lon Malang merupakan wisata yang baru dibangun pada Tahun 2017 dan setiap tahunnya dikunjungi oleh wisatawan baik wisata mancanegara (wisman) maupun wisata nusantara (wisnus).

Pantai Lon Malang yang berada di Jalan Raya Batu Lenger desa Bira Tengah, Sokobanah, Kabupaten Sampang yang tepatnya di Pantai Utara menjadi salah satu destinasi wisata yang dikelola secara swadaya dan menjadi target dalam program Visit Madura menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan satu satunya tempat wisata yang dikelola secara swadaya oleh pihak desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Walaupun tergolong wisata baru namun, pengunjung memiliki rasa ingin tahu dan sangat antusias berkunjung ke Pantai Lon Malang karena tempatnya yang berada di ujung utara Kabupaten Sampang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan semangat Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis yang ingin memajukan Desa Bira Tengah menjadi Desa Wisata yang beranggotakan 20 orang sejak tanggal 7 Desember 2016 yang beralokasi di Desa Bira Tengah dan dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Setiap tahunnya Wisata Pantai Lon Malang semakin berkembang dan meningkat dengan mengadakan rapat koordinasi atau pertemuan-pertemuan membahas tentang perkembangan Pantai Lon Malang

kedepannya supaya menjadi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri dan mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki. Sektor pariwisata berhasil menunjukkan peran yang cukup berarti, terutama sebagai penggerak kegiatan perekonomian melalui kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes kesempatan berusaha, dan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan itu, pihak pengelola dan pemerintah terus berusaha melakukan upaya-upaya pengembangan untuk meningkatkan potensi wisata di berbagai daerah.

Pihak Desa adalah sebagai Pembina tempat pengelolaan wisata tersebut, dengan memberikan pembinaan pelatihan dan pengelolaan desa mengenai Usaha Mikro. Diungkapkan pula sekitar lokasi Pantai Lon Malang Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah yang mulai beroperasi sejak tahun 2017 itu ada 15 usaha mikro yang membuka cafe dan lesehan, 2 usaha mikro di luar lokasi dengan yang sama serta berjejer pula para kelompok binaan dan PPL Pertanian dan Perikanan. Untuk fasilitas yang ada di tempat wisata dengan biaya swadaya masyarakat berupa ATV 9 unit yang disewakan 20 ribu per 10 menit, Odong odong 1 unit mengelilingi area wisata dengan tiket 3 ribu, Gazebo 6 unit dan payung pantai 5 unit.. Selama ini, pendamping melakukan koordinasi dengan Pihak Pengelola, Kecamatan, Kepala desa dan tokoh masyarakat supaya pengelolaan maupun fasilitas yang disediakan tidak melanggar dari etika, norma maupun ketersinggungan masyarakat setempat.

Salah satu tolak ukur dan keberhasilan pengembangan pariwisata adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat atau daerah untuk membeli produk wisata yang ditawarkan atau menikmati

daya tarik wisata yang ditawarkan. wisatawan akan datang, dan bahkan akan mengulangi kedatangannya ke suatu daerah guna menikmati obyek wisata jika mereka merasa terpenuhi segala kebutuhannya pada saat berada di daerah tujuan wisata itu sehingga mereka memiliki kesan yang baik terhadap obyek wisata yang dikunjungi. supaya wisatawan mempunyai kesan yang baik ketika berkunjung ke suatu daerah, maka perlu diusahakan supaya di daerah tersebut tersedia berbagai fasilitas yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan wisatawan.

Dapat dilihat dari tabel data pengunjung tempat wisata alam yang dibuat oleh Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang pada Tahun 2018 –Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pengunjung Wisata Alam Lon Malang

2018		2019		2020	
Wisman	Wisnus(rb)	Wisman	Wisnus(rb)	Wisman	Wisnus(rb)
-	161,136	353	511,430	325	8,313

Sumber data : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Olahraga Kab
Sampang 2018

Dapat dilihat dari data diatas, wisata Pantai Lon Malang mengalami kenaikan sejumlah pengunjung yang sangat tinggi dari awal dibukanya wisata Lon Malang hingga pada pada Tahun 2019 mencapai 511,430 rb wisata nusantara dan jumlah wisata mancanegara mencapai 353 orang. Namun, pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 terjadi

penurunan pengunjung ditutup selama 4 bulan dengan menggunakan protocol kesehatan Pantai Lon malang tetap membuka wisata lon malang. Disamping meningkatnya jumlah pengunjung yang terjadi dalam pengelolaan Wisata Pantai Lon Malang terdapat beberapa masalah diantaranya adanya peran kelembagaan yang tumpang tindih, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan dalam pelaksanaannya, tidak semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan lon malang sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Secara umum, insan pariwisata tersebut dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah (Pinata & Gayatri 2005). Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok masyarakat masyarakat maupun perorangan yang mendukung pengelolaan wisata alam. Selanjutnya kelompok swasta meliputi kelompok usaha wisata dan para pengusaha serta instansi pemerintah terdiri atas pemerintah pusat maupun daerah. Para stakeholder mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Peran dan kepentingan tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang terjalin dalam pengelolaan wisata alam, baik dalam bentuk suatu kebijakan dan tugas pokok dan fungsi maupun aturan kelembagaan lainnya. Hubungan kerjasama antar stakeholder dalam suatu pengelolaan wisata alam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Sehingga penulis mengambil judul skripsi dengan judul **“ANALISIS KELEMBAGAAN PARIWISATA LON MALANG DI KABUPATEN SAMPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kelembagaan Pariwisata Lon Malang
- b. Bagaimana peran Pariwisata Lon Malang
- c. Bagaimana hubungan antar Pariwisata Lon Malang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kelembagaan Pariwisata Lon Malang
- b. Untuk mengetahui peran pelaku Pariwisata Lon Malang
- c. Untuk mengetahui hubungan antar pelaku Pariwisata Lon Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadikan bahan informasi dan dapat pula sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian yang selanjutnya, terutama pada penelitian yang sangat berhubungan dengan kelembagaan pariwisata Lon Malang di Kabupaten Sampang. Penelitian ini juga dapat menjadikan suatu inspirasi kepada para peneliti yang selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian menggunakan objek penelitian yang berbeda serta pendapat yang berbeda pula.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis dapat memperoleh berbagai tambahan pengetahuan dan dapat pula membandingkan antara teori yang diperoleh oleh penulis sehingga dapat mengikuti kuliah dengan penelitian yang dilakukan. Dapat pula sebagai bahan informasi bagi beberapa pihak yang berkepentingan

serta dapat bermanfaat bagi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup.

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang ditetapkan fokus penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung dan dapat menguatkan penelitian, serta menguraikan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi peneliti, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan dianalisis, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan pembahasan menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan judul penelitian ini.